

Yosin Kogoya

Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: kogoyajhosin@yahoo.co.id

Achmad Nurmandi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: nurmandi_achmad@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2015.0026>

Konflik Politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012)

ABSTRACT

The implementation of direct elections is a form of regional autonomy in addition to the area where given the right to regulate its own territory, the people are also exempt determine their leaders. Unfortunately there is beyond the elections held in accordance with law and justice corridor, It triggers a conflict between elements of society and government, as happened in the election of a Peak District, Papua years 2011-2012, the country peak conflict that occurs as a result dualism Gerindra party recommendations, which the DPP and DPD Gerindra party to give S.K Simon Alon-Josiah Tenbak as incumbent Gerindra, while DPC provide recommendations to Elvis Tabuni-party Herri Dosinaen, this in because there is an emotional bond between Thomas Tabuni (DPC chairman of the country party Gerindra peak) as a child and Elvis Tabuni (district candidate) as a father. The type of the research conducted by the authors is to use a descriptive study, where the study site is Ilaga, peak district, while the authors explore how the information is to direct observation and interviews while also utilizing literature-literatur from the published literature and analysis used is purpose random sampling analysis using descriptive to analyze the data. The peak district of Puncak Jaya district Proliferation of 2007, and in 2011 made this a highlight of the country election that claimed the lives of 300 people died and 900 people were injured, this conflict is a conflict since most victims in law election in Indonesia. Leveling system of one man one vote democracy make electoral conflicts in Papua can not be avoided due to the immaturity of the people on the system, so that a recommendations is the author of the government to change the system becomes Nokens democratic systems, which is represented by the 1025 and 1 person as a democratic people of Papua.

Keywords: Election, political conflict, Papua peak district.

ABSTRAK

Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah selain diberikan hak untuk mengatur wilayahnya sendiri, rakyat juga dibebaskan menentukan pimpinan mereka. Sayangnya tidak seterusnya Pilkada dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum dan keadilan. Hal tersebut memicu adanya konflik antara elemen masyarakat dan Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di Pilkada Kabupaten Puncak, Papua Tahun 2011-2012, konflik yang terjadi di Kabupaten Puncak merupakan konflik yang terjadi akibat adanya dualisme rekomendasi partai Gerindra, dimana DPP dan DPD partai Gerindra memberikan S.K kepada Simon Alon-Yosia Tenbak sebagai calon Bupati dari Partai Gerindra, sedangkan DPC memberikan rekomendasi Partai kepada Elvis Tabuni-Herri Dosinaen, hal ini karena ada ikatan emosional antara Thomas tabuni (calon bupati) sebagai Ayah. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan penelitian deskriptif, dimana lokasi penelitian adalah kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak, adapun cara penulis menggali informasi adalah dengan melakukan observasi secara langsung, dan interview selain itu juga dengan menggunakan literatur-literatur dari berbagai kepustakaan dan analisis yang digunakan adalah analisis purposive random sampling dengan menggunakan deskriptif untuk menganalisis data. Kabupaten Puncak

merupakan kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2007, dan pada tahun 2011 dilakukan PemiluKada di Kabupaten Puncak ini merupakan Pemiukada yang menelan korban nyawa 300 orang meninggal dan 900 orang luka-luka, konflik ini merupakan konflik yang paling banyak korban semenjak diterapkannya Undang-Undang Pilkada di Indonesia. Penyamaraan sistem demokrasi one man one vote membuat konflik pilkada di Papua tidak bisa dihindari akibat ketidakdewasaan masyarakat dalam memahami sistem tersebut, sehingga yang menjadi rekomendasi penulis adalah pemerintah segera merubah sistem demokrasi one man one vote menjadi sistem demokrasi Noken, yaitu 1025 orang diwakili oleh 1 orang sebagai demokrasi orang Papua.

Kata Kunci: PemiluKada, konflik politik, Kabupaten Puncak Papua.

PENDAHULUAN

Papua adalah daerah di ujung timur Indonesia yang selama ini masih menjadi perhatian publik nasional dan internasional karena situasinya yang jauh dari kesan kondusif dan aman. Papua terus bergejolak sejak berada di bawah administrasi pemerintahan Indonesia untuk pertama kali melalui penyerahan dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Mei 1963. Selanjutnya Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tanggal 14 Juli hingga 2 Agustus 1969, yang kemudian dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 dalam sidang tanggal 19 Nopember 1969. Namun hasil ini tidak menghilangkan konflik.

Sejak awal, baik saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum PEPERA atau sesudah Papua secara resmi menjadi bagian dari wilayah Indonesia, pemerintah memilih dan menggunakan pendekatan keamanan (militer) dengan dalih menegakan kedaulatan negara, mengikis habis gerakan separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua. Bahkan, pendekatan ini juga dijalankan oleh pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua yang sejak awal menolak integrasi Papua ke Indonesia dengan jalan damai. Dalam kenyataannya, penanganan konflik Papua tidak berubah walaupun rezim telah beberapa kali berganti. Hal itu bisa dilihat dengan belum adanya perubahan signifikan kebijakan pusat setelah 50 tahun lebih integrasi Papua ke Indonesia. Faktanya pendekatan keamanan dan militer masih

dipertahankan dan digunakan dengan alasan ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Setelah memasuki masa reformasi, Indonesia memasuki babak baru di mana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai bagian dari otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi. Di Indonesia ada 2 (dua) daerah yang mendapat porsi otonomi yang berbeda dengan daerah - daerah lainnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu otonomi khusus Papua yang tertuang dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan otonomi khusus Aceh, hal ini diberikan agar tidak terjadi disintegritas bangsa Indonesia. Namun dalam perkembangannya Otonomi Khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua dirasakan tidak menyentuh hingga keseluruhan masyarakat Papua. Hal ini disebabkan karena pemberian otonomi khusus ini tidak disertai dengan kewenangan untuk menjalankannya. Sehingga lahir istilah “memberikan kepala tetapi ekor ditahan”, artinya pemerintah propinsi papua dalam menjalankan setiap pasal dalam undang-undang otonomi khusus harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan banyak sekali anggaran yang digunakan pemerintah Papua untuk melobi kepada pemerintah pusat agar menyetujui pelaksanaan setiap pasal dalam undang-undang 21 tahun 2001.

Pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pemilihan umum kepala daerah adalah memperkuat legitimasi demokrasi. Oleh karena itu Pemilihan umum kepala daerah langsung memberikan harapan pada rakyat bahwa dengan memilih kepala daerahnya sendiri mereka dapat hidup lebih sejahtera tidak seperti demokrasi perwakilan yang sarat dengan banyak kepentingan dari partai politik. Harapan akan demokrasi yang lebih baik ini

diikuti dengan desentralisasi dan didukung oleh otonomi daerah yang menyertainya di mana daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di daerah tidak selalu berlangsung mulus dan selalu ada masalah yang menyertainya. Berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang selalu menimbulkan kontroversi ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan di lapangan. Demikian halnya dengan pemilihan umum kepala daerah di propinsi papua yang pasti selalu diwarnai dengan konflik baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal yang melahirkan banyak sekali korban baik itu harta maupun nyawa, seperti yang diungkapkan gubernur Papua bahwa Korban yang jatuh dalam pemilihan umum kepala daerah, lebih banyak ketimbang akibat gerakan-gerakan separatis.

Keberadaan pemilihan umum yang demokrasi langsung umum bebas dan rahasia itu justru mengantar masyarakat papua kepada kepunahan, pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah ini lebih cenderung kepada kesejahteraan yang terkesan dipaksakan, dengan tidak memperhatikan kearifan budaya lokal, hal ini diikuti dengan ketidak siapan warga masyarakat setempat yang konon latar belakang pendidikan dan juga emosional yang masih labil, sehingga mudah untuk terjebak dalam politik praktis, yang menyebabkan sering terjadinya konflik dalam keluarga maupun antara suku dalam suatu wilayah.

Pemilihan umum kepala daerah di kabupaten puncak diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon bupati dan wakil bupati dari berbagai partai politik pengusung. Salah satu partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati kabupaten puncak adalah Partai Gerindra. Partai ini mengeluarkan 2 (dua) SK (surat keputusan) yang sama agar kader partainya untuk diusung menjadi calon bupati, yang membedakannya adalah salah satu surat keputusannya berasal dari

Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta dan surat keputusan satunya berasal dari Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten Puncak. Mengingat masalah konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah dikabupaten puncak ini telah menelan korban yang sangat banyak, hal ini membuat penulis merasa perlu untuk melakukan riset dan analisis untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik politik ini.

KERANGKA TEORI

TEORI KONFLIK

Menurut Webster (Dalam Dean G dan Jeffrey Z Rubin, 2004:9), istilah “conflict” didalam bahasa aslinya berarti suatu “perkelahian, peperangan dan perjuangan”. Lebih lanjut Webster mendefinisikan konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Sedangkan menurut Pringgodigdo (1973:687) kata konflik berasal dari bahasa Latin “Conflictus”, yang artinya pertentangan atau perselisihan. Dengan demikian secara umum konflik merupakan perwujudan dari bermacam-macam perselisihan antara dua pihak atau lebih, baik merupakan konflik pribadi atau konflik yang bersifat kelompok. Sejalan dengan itu Surbakti (1992;149) menyatakan bahwa konflik memiliki makna benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam masyarakat kita yang masih dikungkung kepentingan primordialisme sering kali konflik sosial yang bersekala besar banyak menelan korban baik harta dan nyawa, sering berawal dan dipicu konflik antar pribadi, konflik sosial antar golongan bahkan antar agama.

Dalam masyarakat pluralis dan masyarakat homogen pun konflik bisa terjadi. Maswadi Rauf (2002:2) mengatakan konflik adalah gejala sosial yang selalu terdapat didalam setiap masyarakat dalam

setiap kurun waktu tertentu. Konflik merupakan bagian yang tak terlepisahkan dalam masyarakat karena konflik merupakan salah satu bentuk hubungan sosial.

Dalam kehidupan sosial, konflik dipandang sebagai hal yang lumrah, karena dalam interaksi sosial perbuatan satu orang akan sangat mungkin untuk bertentangan dengan perbuatan orang lain. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat akan tercipta hubungan harmonis yang mutlak. Sebagaimana ditegaskan oleh dimasyarakat memang berbeda. Menurut Laurent Muchielli (dalam Anthony Giddens, 2004:59-60) perbedaan itu sendiri sudah merupakan faktor yang menjadi prasyarat konflik. Beberapa hal yang merupakan perbedaan itu adalah: pertama, perbedaan temperamen dan kepribadian. Temperamen merupakan faktor interen setiap individu, dan faktor itu pasti akan mewarnai bentuk dan kualitas kepribadian seseorang. Bentuk dan kualitas kepribadian seseorang pasti berbeda dengan orang lain, sekalipun orang.

Konflik antara budaya pun sering tidak dapat dihindari dinegara Republik Indonesia yang komunitas penduduknya homogen. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber (dalam Agus Sriyanto 2007:2) (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan

66

memperbarui tampilan, namun disfungsi karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

BENTUK-BENTUK KONFLIK

Pada dasarnya konflik dalam kehidupan masyarakat ada dua macam bentuknya, yaitu::

A. KONFLIK HORIZONTAL

Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain, dalam satu komunitas di wilayah suatu negara. Unsur utama yang mendorong terjadinya konflik horizontal adalah kepentingan primordial yang meliputi unsur agama, etnis, kebudayaan dan kelompok kepentingan lainnya.

Dalam hubungannya dengan konflik horizontal, Johnson dan Duinker (dalam Mitchell, 2003:365) menyatakan konflik atau pertentangan antar banyak kepentingan kelompok, meliputi; nilai budaya, agama, adat istiadat dan etnisitas sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ini ada. Dengan demikian konflik Dahrendorf (1986:162) bahwa setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, setiap masyarakat mengandung konflik; setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial; serta setiap masyarakat terintegrasi dalam penguasaan atau dominasi seorang atau kelompok atas orang lainnya.

B. KONFLIK VERTIKAL

Konflik vertikal merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang berkuasa terhadap kelompok yang dikuasai, kelompok yang memerintah dengan kelompok yang diperintah, serta

pertengan antara kelas ada dimasyarakat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat yang sengaja disusun atau dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, organisasi dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam sistem pelapisan sosial yang merupakan nilai-nilai lain dari pada uang, tanah, dan benda ekonomis lainnya yang bersifat vertikal.

Teori Marxis (dalam Arief Budiman, 2002:56 menyatakan bahwa kekuasaan kelompok atau kelas dominan dalam masyarakat merupakan konflik antar kelas sosial ekonomi. Hal itu tampak dalam kehidupan setiap hari betama semakin melebarnya rentang perbedaan antar kelompok kelas ekonomi bawah, menengah dan kelas atas.

Sementara Max Weber (dalam Ngadisah, 2003:255) konflik terjadi karena ketidakadilan sosial, yang terbagi dalam kelas-kelas dan status golongan. Karena perbedaan kekuasaan diantara kelompok-kelompok itu, maka terjadilah ketidaksamaan sosial, yang terbagi dalam kelas-kelas dan status golongan. Karena perbedaan kekuasaan diantara kelompok-kelompok itu, maka terjadilah ketidaksamaan sosial. Disini kekuasaan didefinisikan sebagai kekuatan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk terus melaksanakan kehendaknya walaupun bertentangan dengan kehendak masyarakat secara umum. Dalam kenyataannya kekuasaan tidak selalu memiliki martabat sosial, akan tetapi kekuasaan pada sektor ekonomi selalu menduduki tempat sentral dalam analisis kelas dan status golongan dimasyarakat.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK

A. FAKTOR STRUKTURAL

Talcott Parson (dalam Narwoko,dkk, 2004:237) melihat masyarakat sebagai sistem interaksi kolektif merujuk pada

persekutuan hidup (social community) yang dinilai sebagai inti sari struktur sosial yang fungsi utamanya adalah mengintegrasikan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat selalu berkembang dalam pola relasi yang beragam sesuai dengan konteks, ruang dan waktu relasi tersebut berlangsung.

Dalam hubungannya kondisi struktural masyarakat, Adam Smith (dalam Anthony Giddens,dkk, 2004:2007) mengakui bahwa masyarakat memang terbagi baik secara horizontal maupun vertikal. Secara Horizontal dapat berupa ikatan-ikatan komunitas dengan identitas kolektif melekat kuat. Sedangkan secara vertikal dapat tampak lebih kontras yang ditentukan oleh posisi ekonomi, status kelahiran,penghasilan, posisi kekuasaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan secara vertikal dapat terjadi akibat kekerasan struktural yang dilakukan negara (pemerintah)berupa ketidakadilan dalam akses ekonomi bagi setiap orang atau kelompok.

Semua ketidakadilan ekonomi menimbulkan perbedaan tersebut diatas pada gilirannya dapat mendorong terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, menurut Smelser (dalam Titik Suwaryati,dkk, 2003:30) ada beberapa faktor dominan yang dapat memunculkan konflik, yaitu; pertama, kesesuaian struktur, dalam arti struktur masyarakat yang menunjang terjadinya konflik kedua, ketegangan struktur, rasa ketidakadilan dalam masyarakat mendorong banyak perilaku atau tindakan ekstrim.

Duverger (2002: 157) menjelaskan bahwa konflik dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor individual dan faktor kolektif. Konflik individual sering disebabkan perbedaan faktor pribadi, yang meliputi bakat atau talenta alami dan kondisi psikologis seseorang. Sedangkan konflik kolektif (Haryanto, 1991:64) lebih banyak disebabkan oleh kondisi yang melekat pada kumpulan individu-individu sebagai suatu kesatuan.

Konflik sosial ekonomi merupakan konflik yang terjadi karena perebutan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi atau penguasaan

sumber daya ekonomi dalam banyak masyarakat dikarenakan ketimpangan struktural yang diciptakan sistem politik dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Ketimpangan ekonomi sering terjadi manakala kelompok menirotas justru menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi nasional dalam sebuah negara.

Dalam pandangan kaum konservatif, konflik politik yang muncul mencerminkan perjuangan antar ras, suku atau golongan (koletif); sedangkan kaum sosialis, konflik politik lebih disebabkan perhuangan antar kelas yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan di masyarakat sering kali konflik individu tersebut melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas. Kenyataannya, ada banyak konflik individual berkembang menjadi konflik kolektid yang amat berbahaya.

B. FAKTOR KULTURAL

Tata nilai yang dianut satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain cenderung berbeda. Presepsi mengenai nilai dalam kehidupan manusia sangat dipengaruhi kebiasaan dan kultur yang berlaku dimana orang tersebut berada. Menurut Horton dan Hunt (dalam Dwi Narwoko, dkk, 2004:35), nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Karena itu suatu tindakan dianggap sah, dapat diterima masyarakat, kalau tindakan itu dpat harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana indakan tersebut dilakukan.

C. FAKTOR TINDAKAN ATAU TINGKAH LAKU

Ada dua proses sosiologis yang mempengaruhi perilaku kelompok secara mendalam dan menyeluruh. Pertama, integrasi sosial yang merupakan kecendrungan untuk saling menarik dan saling menyesuaikan diri. Kedua, diferensiasi sosial, yakni kecenderungan kearah perkembangan sosial yang berlawanan seperti perbedaan menurut ciri biologis, agama yang dianut, profesi dan bahkan jenis kelamin (J. Dwi Narwoko, 2004:172).

Dalam praktek hidup sehari-hari diferensiasi sosial dan integrasi

sosial biasanya muncul bersamaan dengan terbentuknya stratifikasi sosial. Perubahan sosial baik yang bersifat horizontal maupun vertikal akan membawa konsekuensi loncatan perilaku baik individu yang amat jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ada perubahan kearah konflik sosial. Hak itu amat tergantung dengan kondisi dan sikap masyarakat dalam merespon kapan dan pada saat mana perubahan sosial itu berlangsung.

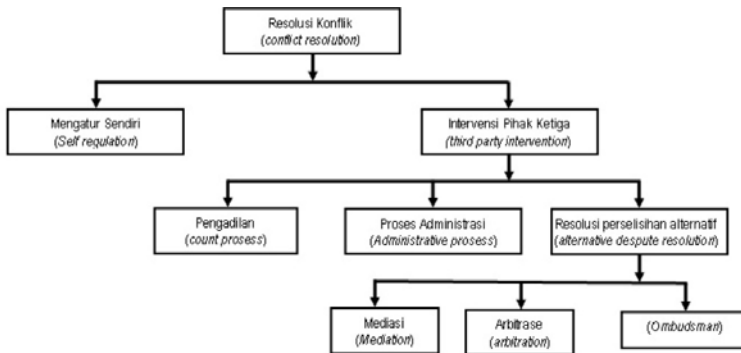
RESOLUSI KONFLIK

Pengelolaan atau resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan yang ada didalam kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan resolusi konflik Hugh Miall (2011:31) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah istilah konprehensif yang mengaplikasikan bahwa sumber konflik yang rumit sekalipun akan mendapat perhatian dan dapat diselesaikan. Karena itu, pada hakekatnya resolusi konflik diandang sebagai upaya peanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikannya dengan membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama (langgeng) diantara kelompok-kelompok yang sedang bermusuhan.

Menyangkut pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Warawan (2010:117) menjelaskan resolusi konflik (*conflict resolution*) adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan menggunakan metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Metode resolusi konflik pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Seperti yang dapat digambarkan seperti pada Gambar 1:

Gambar 1 menunjukkan diagram resolusi konflik. Resolusi konflik melalui pengaturan sendiri terjadi jika para pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka. Intervensi

pihak ketiga terdiri atas (1) resolusi melalui pengadilan, (proses administratif, dan (3) resolusi perselisihan alternatif (alternative dispute resolution).



GAMBAR 1. METODE RESOLUSI KONFLIK

KONFLIK POLITIK

Pilkada sebagai salah satu produk yang dilahirkan dari otonomi daerah, mempunyai banyak sisi positif yang beriringan dengan sisi negatif yang dipunyai. Pilkada yang merupakan suatu kompetisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik seperti bupati/wakil bupati, walikota / wakil walikota dan Gubernur / wakil Gubernur menjadi ajang perebutkan kekuasaan dan pertempuran yang dianggap penting, kekuasaan yang diperebutkan ini selain dilegitimasi oleh hukum, juga dilegitimasi oleh sebuah proses baik itu karena keturunan (kesultanan), pengangkatan (pengakuan / otoriter), sampai pada pemilihan yang demokrasi (seperti sekarang ini).

Menurut Elvi Juliansyah,

“Ada dua titik fokus konflik politik, pertama berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan pengaruh yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat, sebagai suatu gejala politik yang normal untuk menciptakan keinginan - keinginan berdasarkan profesionalitas. Kedua, keputusan-keputusan politik yang diambil oleh eksekutif (administrator publik) dalam menjalankan kekuasaannya tidak selamanya berjalan lurus sesuai

dengan keinginan yang dikehendaki, tetapi harus mendalami pokok-pokok permasalahan sebagai bentuk pemecahan terhadap masalah, pengambilan keputusan mengikat untuk mencapai kesejahteraan bersama”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, di mana data yang ada dikumpul kemudian diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisa. Pada dasarnya penelitian dengan menggunakan jenis penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian ditarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variable tertentu

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Kajian Literatur dan Wawancara. Unit analisis data dalam penelitian ini adalah ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik politik yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Puncak, mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dan juga menghemat waktu dan dana, maka unit analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis *purposive random sampling*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *proportionate stratified random sampling* dimana pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dan berstrata secara proporsional, mengingat anggota populasi yang akan dijadikan sampel adalah heterogen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam dengan menggunakan

teori-teori konflik dan politik sebagai alat interpretasi terhadap data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

KONFLIK POLITIK

A. KONFLIK HORIZONTAL

Konflik politik horizontal pada pemilihan umum dikabupaten puncak adalah konflik yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Puncak (KPUD) dengan pengurus Partai Gerindra baik dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra (DPC) Kabupaten Puncak, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra (DPD) propinsi Papua dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra (DPP). Menurut ketua KPUD Kabupaten Puncak Yorin Tabuni, Konflik antara KPUD dengan pengurus Partai Gerindra ini bemula saat pendaftaran yang dilakukan oleh calon bupati Simon Alom dan Yosia Tenbak, tepatnya hari sabtu 31 juli 2011, Simon Alom dan Yosia Tenbak dengan massa mendatangi kantor KPUD untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Puncak. Namun pada saat itu ketua KPUD Kabupaten Puncak, Yorin Tabuni menolaknya, dengan alasan bahwa surat rekomendasi Partai Gerindra dari DPP propinsi Papua yang digunakan oleh Simon Alom untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum adalah tidak sah.

Dan mengatakan bahwa surat rekomendasi Partai Gerindra dari DPC yang sah, yang pada saat itu telah digunakan oleh pasangan calon bupati Elvis Tabuni dan Heri Dosinaen untuk mendaftarkan diri di KPUD pada hari rabu 27 Juli 2011. Menurut warga yang turut hadir pada saat pendaftaran yang dilakukan oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak, KPUD menolak surat rekomendasi yang dibawa oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak pada saat itu juga, tanpa melalui proses, seharusnya KPUD menerima terlebih dahulu surat rekomendasi yang dibawa oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak. Kemudian

dilakukan pembicaraan antara KPUD dengan pihak pengurus partai.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD terhadap surat rekomendasi DPD Partai Gerindra yang dibawa oleh Simon Alom dan Yosia Tenbak ini, membuat wakil ketua DPD Partai Gerindra propinsi Papua Amir Mahmud Madubun yang saat itu hadir dikantor KPUD Kabupaten Puncak pada saat pendaftaran tersebut marah dan mengancam akan menggugat KPUD kabupten Puncak ke KPU Propinsi Papua. Akhirnya keributan kecil pun terjadi didalam kantor KPUD Kabupaten Puncak. Menurut massa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak, KPUD telah dibayar oleh pihak Elvis Tabuni, namun pihak KPUD sendiri membantahnya, KPUD melepaskan masalah ini ke rumah tangga Partai Gerindra agar diselesaikan sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) Partai Gerindra, namun hal ini ditentang oleh wakil ketua DPD Partai Gerindra Amir Mahmud Madubun dan, meminta KPUD menerima surat rekomendasi yang dibawa oleh Simon Alom dan Yosia Tembak. Hal ini tentu saja ditolak oleh KPUD Kabupaten Puncak. Akhirnya KPUD Kabupaten Puncak menyurati Ketua DPP Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto, agar masalah ini diselesaikan di internal partai, namun DPP Partai Gerindra tidak merespon surat tersebut. Menurut ketua KPUD Kabupaten Puncak jika, DPP Partai Gerindra merespon surat tersebut dan menarik masalah tersebut kedalam rumah tangga partai untuk diselesaikan, maka masalah ini tidak akan menjadi besar seperti sekarang ini.

Manurut massa pendukung Simon Alom, keributan didalam kantor KPUD pun semakin membesar dan tidak ditemukan titik terang antara calon bupati dan wakil bupati Simon Alom-Yosia Tenbak dan KPUD Kabupaten Puncak. Massa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak yang pada saat itu berada diluar kantor KPUD Kabupaten Puncak, marah dan merusak kantor KPUD Kabupaten Puncak, demikianlah konflik ini terus berlanjut, hingga melahirkan perang antara kedua massa pendukung, tentunya akibat

dari dualisme rekomendasi yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra.

B. KONFLIK VERTIKAL

Konflik politik vertikal pada pemilihan umum dikabupaten Puncak, dapat dikatakan juga merupakan konflik kepentingan antara kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebagai kabupaten Induk) dan konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang konflik politik Vertikal pada pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Puncak. Hal ini menurut penulis cukup ekstrim untuk dijelaskan, namun karena ini merupakan hasil penelitian dan juga sebagai gambaran bagi para pembaca agar dapat memahami secara benar, penyebab terjadinya konflik politik dikabupaten Puncak. Konflik itu bermula saat Kabupaten Puncak dimekarkan dari Kabupaten Puncak Jaya, hal ini disebabkan karena kebanyakan pejabat dari Kabupaten Puncak Jaya adalah warga dari Distrik Ilaga (Kabupaten Puncak) dan beberapa distrik disekitar Ilaga yang tidak mendapatkan posisi atau jabatan dikabupaten Puncak Jaya akhirnya dengan semangat undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, mereka (elit politik) mendesak pemerintah Pusat agar segera memekarkan Kabupaten Puncak dari Kabupaten Puncak Jaya.

Hampir semua responden yang peneliti wawancarai selalu menyalahkan pemerintah pusat, sebagai *lakon* terjadinya konflik politik pemilihan umum kepala daerah dikabupaten Puncak, Papua. mereka mengatakan bahwa kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka persatuan dan kesatuan itu dengan sendirinya akan terpecah, jumlah masyarakat Kabupaten Puncak semakin sedikit dengan adanya pembunuhan, warga masyarakat tidak mau tinggal lagi dikabupaten puncak, mereka semua pindah kedaerah-daerah disekitar Kabupaten Puncak, yaitu kabupaten Nabire, kabupaten

76

Timika dan kabupaten Jayapura. Kehidupan yang seperti tentunya akan menghambat pembangunan dikabupaten Puncak, sehingga penulis mengharapkan agar pemerintah segera mencari solusi yang tepat agar warga masyarakat Puncak dapat tinggal dengan tenang diatas tanah leluhurnya sendiri dan membangunnya, menjadi kabupaten yang maju dan dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya.

KONFLIK POLITIK PADA SAAT PENCALONAN KEPALA DAERAH

KONFLIK HORIZONTAL

Konflik politik secara horizontal pada pemilihan umum kepada daerah dikabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara pendukung calon bupati Simon Alom dan Elvis Tabuni. menurut salah satu tokoh adat dikabupaten Puncak yaitu Naftali Wakerkwa.S.Sos, konflik ini terjadi akibat dari adanya dualisme rekomendasi Partai Gerindra kepada dua calon bupati, dimana Partai Gerindra mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan (SK), rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra propinsi Papua diberikan kepada Simon Alom, S.Sos sedangkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diberikan kepada Elvis Tabuni, SE.

Penolakan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Puncak terhadap surat rekomendasi yang dibawa oleh calon bupati dan wakil bupati Simon Alom-Yosia tenbak ini, membuat masa pendukungnya mengamuk dan merusak fasilitas kantor KPUD Kabupaten Puncak. Saat itu aparat keamanan dari Brimob POLDA Papua yang berada ditempat berusaha untuk mengamankan kantor KPUD dengan mengeluarkan tembakan peringatan, namun tembakan itu diarahkan kearah masa pendukung Simon Alom- Yosia Tenbak, akhirnya 3 (tiga) orang terkena tembakan, akhirnya 2 (Orang) tewas ditempat dan 1 (satu) orangnya lagi mengalami luka yang cukup serius.

Karena masa pendukung Simon Alom dan Yosia Tenbak ini merasa bahwa aparat Brimob Polda Papua ini adalah pendukung calon bupati Elvis Tabuni, mereka (masa pendukung Simon Alom-Yosia Tenbak) menyerang kediaman Elvis Tabuni, akhirnya 19 (Sembilan belas) orang masa pendukung calon bupati Elvis Tabuni-Heri Dosinaen tewas seketika, selain terkena panah, tombak, parang dan kampak ada yang dibakar hidup-hidup dalam satu rumah yaitu Dewa Wanimbo dan Istrinya beserta seorang wartawan media cetak lokal. Hal ini dirasakan oleh masa pendukung Elvis Tabuni sebagai suatu perbuatan yang sama sekali tidak manusiawi.

Menurut Elvis Tabuni, penembakan yang dilakukan oleh aparat keamanan Brimop Polisi Daerah Papua itu adalah atas kehendak mereka (BRIMOP) sendiri, bukan atas perintah dari Elvis Tabuni. Akhirnya masa pendukung calon bupati Elvis Tabuni-Yosia Tenbak tidak menerima hal tersebut dan kembali menyerang dihari berikutnya hingga korban dari masa pendukung Simon Alom mencapai 29 orang tewas belum termasuk yang luka-luka. Perang ini tidak berhenti sampai disitu saja, perang ini terus berlanjut dihari-hari berikutnya dalam jangka waktu satu tahun dan menelan korban dari dua masa pendukung calon bupati berjumlah 300 jiwa meninggal dan 900 orang luka-luka, serta kerugian harta dan benda milyaran rupiah.

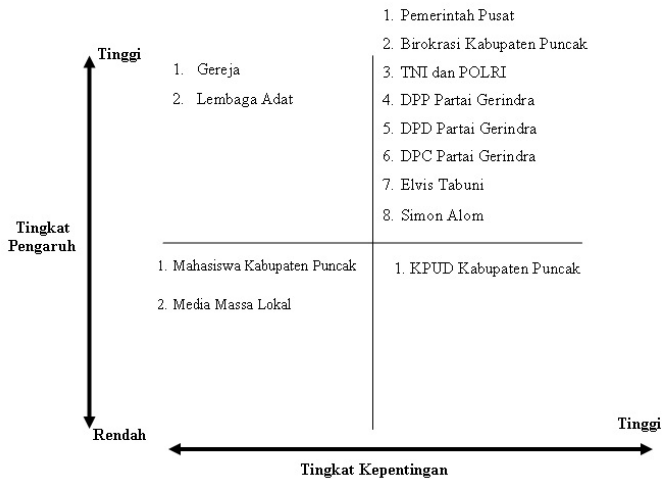
KONFLIK VERTIKAL

Konflik Vertikal pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Puncak adalah konflik yang terjadi antara Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra (DPC). Dengan adanya dualisme rekomendasi dari partai Gerinda, kepada dua calon bupati Kabupaten Puncak, rekomendasi dari DPD propinsi Papua diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Simon Alom-Yosia Tenbak, sedangkan rekomendasi dari DPC Partai

78

Gerindra diberikan kepada calon bupati dan wakil bupati Elvis Tabuni-Heri Dosinaen. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam rumah tangga Partai Gerindra sendiri, mengapa sampai satu partai bisa mengeluarkan dua rekomendasi secara bersamaan.

Menurut penjelasan ketua KPUD Kabupaten Puncak rekomendasi yang digunakan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Elvis Tabuni dan Yosia Tenbak menunjukkan Surat Keputusan (SK) pergantian. Dalam SK yang dipegangnya (Elvis Tabuni-Yosia Tenbak) tertera bahwa Thomas Tabuni sebagai ketua DPC Parti Gerindra Kabupaten Puncak mengganti Amir Mahmud Madubun. SK itu terbit sejak 27 Juli 2011. Memberikan rekomendasi kepada Elvis Tabuni dan Yosia Tenbak sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Gerindra.



PEMETAAN PARA AKTOR KEPENTINGAN BERDASARKAN TINGKAT KEPENTINGAN DAN PENGARUH

Berdasarkan penjelasan dari Elvis Tabuni, bahwa dirinya (Elvis Tabuni) meminta rekomendasi itu sendiri dari ketua DPC Thomas Tabuni, hal ini disebabkan karena Thomas Tabuni sendiri adalah anak kandung dari pada Elvis Tabuni yang saat itu akan maju sebagai calon bupati dari Partai Gerindra. Sehingga sebagai anak, Thomas

Tabuni selaku ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Puncak mengambil keputusan dengan mengatas namakan Partai Gerindra, memberikan SK Partai Gerindra kepada Ayahnya (Elvis Tabuni) untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Puncak.

RESOLUSI KONFLIK POLITIK PILKADA KABUPATEN PUNCAK

Adapun resolusi konflik politik pilkada Kabupaten Puncak yang terjadi antara Elvis Tabuni dan Simon Alom. Yang secara teori menurut Warawan (2010:117) adalah perlu adanya intervensi pihak ketiga dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penyelesaian konflik politik di Kabupaten Puncak, resolusi konflik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



PENGADILAN

Disini masing-masing calon bupati yang bertikai yaitu Simon Alom dan Elvis Tabuni, diproses secara hukum di Pengadilan Tinggi Jayapura. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Elvis Tabuni, sampai saat ini pengadilan belum mengambil keputusan terkait konflik politik tersebut

MEDIASI

Dalam proses mediasi, menurut Kepala Sub Tata Pemerintahan

Kabupaten Puncak, Jhon Kogoya mengatakan bahwa pemerintah telah mempertemukan kedua calon bupati yaitu Simon Alom dan Elvis Tabuni untuk segera dilakukan perdamaian antara kedua massa pendukung, dalam mediasi ini disepakati bahwa konflik politik di Kabupaten Puncak akan diakhiri yang ditandai dengan penandatanganan *surat pernyataan* bermetrai 6000 (enam ribu) yang ditandatangani oleh pihak pertama Elvis Tabuni, SE dan pihak kedua Simon Alom, S.Sos. Kemudian yang menyaksikan/mengetahui adalah Pejabat Bupati sementara Drs. James Willem Maniagasi, KAPOLRES Puncak jaya Drs. Marshelis Sarimin, Ketua DPRD Kabupaten Puncak (Ketua I) Yeheskiel Matuan dan DANDIM 1705 / Paniai Letnan kolonel Rudy Jayakarta. Demikianlah akhirnya proses mediasi dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah.

REKONSILIASI

Dalam proses rekonsiliasi konflik ini menurut Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kabupaten Puncak, Jhon Kogoya, S.Sos. Pemerintah menambah aparat keamanan, serta membuka pelayanan umum untuk masyarakat baik itu pelayanan kesehatan dirumah sakit, pelayanan dikantor-kantor pemerintahan dan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Puncak, membuka lapangan terbang (bandara udara) dan juga membuka sekolah-sekolah. Proses rekonsiliasi ini terus berjalan hingga akhirnya terlaksananya pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Puncak.

TAHAP PEMBICARAAN

Tahap ini adalah tahap dimana kedua pasangan calon bupati yang bertikai melakukan pembicaraan untuk mengatasi konflik antara massa pendukungnya, pemerintah dalam hal ini DANDIM 1705 Nabire dan Kapolres Puncak Jaya sebagai penengah dalam tahap ini dibicarakan juga waktu penandatanganan berita acara, tanggungan yang akan dibebankan kepada Simon Alom dan Elvis Tabuni, yang mengakibatkan terjadinya konflik tersebut. Untuk

denda yang diberikan kepada Simon Alom sebanyak 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Elvis Tabuni sebanyak 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Perbedaan ini disesuaikan dengan banyaknya korban yang jatuh akibat dari konflik ini. Dalam konflik politik pilkada Kabupaten Puncak ini, korban yang luka-luka dan tewas paling banyak adalah massa pendukung dari pada Simon Alom, sedangkan pihak Elvis Tabuni tidak terlalu banyak sehingga tanggungan yang diterimanya pun tidak terlalu banyak. Sedangkan, pemerintah daerah Kabupaten Puncak mencairkan dana dari APBD sebesar 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) untuk membayar korban yang luka-luka maupun meninggal pada saat konflik antara massa pendukung tersebut. Jumlah uang ini belum termasuk belanja hewan Babi, ayam dan sayur-sayuran seperti wortel, kentang, kol, daun ubi, dan sayur-sayur lainnya, ada pula beras, ubi, singkong, tebu, keladi, jagung, buah merah, buah pandang (kelapa Hutan). Bahan-bahan makanan ini akan dimasak (Bakar Batu) dan dimakan bersama bersama oleh kedua massa yang konflik untuk disantap bersama oleh kedua massa pendukung yang bertikai, bersama dengan pemerintah, Untuk belanja semua bahan makanan tersebut ditanggung oleh kedua calon bupati yaitu Simon Alom dan Elvis Tabuni, termasuk dengan biaya transportasinya yang menggunakan pesawat. Biaya yang digunakan diluar dari tanggungan masing-masing untuk membayar korban luka-luka dan korban meninggal yang diakibatkan oleh konflik tersebut.

TAHAP PEMBAYARAN KORBAN PERANG.

Pada tahap ini merupakan tahap pembayaran kepada korban perang, pembayaran ini dilakukan oleh masing-masing pihak kepada keluarga korban yang luka-luka ataupun meninggal, seperti yang diungkapkan Elvis Tabuni, bahwa dirinya membayar sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah di distrik Ilaga dan distrik Gome, dirinya (Elvis Tabuni) membayar masyarakat korban akibat

mendukungnya sebagai calon bupati, yang luka-luka mendapatkan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan yang meninggal dibayar 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per jiwa pada tanggal 09 juli 2012. Pembagian besaran uang untuk korban luka-luka dan korban jiwa telah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama antara pemerintah dan kedua (Elvis Tabun dan Simon Alom) calon bupati yang terlibat konflik

Demikian halnya dengan Simon Alom, dirinya telah membayar semua korban yang jatuh, baik itu luka-luka maupun meninggal, korban ini merupakan massa pendukungnya saat terjadi konflik, dirinya (Simon Alom, dengan dana sebesar 8.250.000.000 (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dirinya (Simon Alom) membayar semua korban akibat konflik tersebut, yang luka- luka mendapatkan 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan untuk korban jiwa 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per jiwa.

Begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Puncak yang menyediakan dana sebesar 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) membayar semua korban baik itu luka-luka maupun korban meninggal akibat konflik tersebut. Demikianlah akhirnya semua korban luka-luka maupun korban meninggal menerima pembayaran tersebut.

TAHAP PENANDATANGANAN BERITA ACARA PERDAMAIAN

Menurut tokoh adat Kabupaten Puncak, Naftali Wakerkwa, sebelum dilakukan penandatanganan berita acara perdamaian, sesuai dengan ada masyarakat Kabupaten Puncak, bahwa akan diadakan makan buah pandang (kelapa hutan) bersama antara kepala-kepala suku dari kedua massa yang terlibat konflik, dalam acara dibahas persiapan perdamaian antara suku-suku yang ada di Kabupaten Puncak yang terdiri dari marga-marga sebagai berikut:

1. Alom - Tabun
2. Murib - Telengen dari Sinak

3. Murib - Telenggen dari Kuyawage
4. Murib - Tabuni
5. Dua - Lani
6. Murib - Lebene
7. Morib - Kogoya
8. Wonda - Tabuni
9. Wakerkwa - Kogoya
10. Murib - Wanimbo
11. Wonarengga - Tabuni
12. Wakerkwa - Tabuni
13. Tenemun - Magi
14. Wakerkwa - Magi
15. Kilungga - Magi
16. Pu - Kogoya
17. Dang - Magi
18. Morib - Kogoya

Acara penandatanganan berita acara perdamaian kedua belah pihak antara Elvis Tabun dan Simon Alom dilakukan pada tanggal, 11 Juli 2012, bertempat di Distrik Ilaga, yang merupakan ibu kota Kabupaten Puncak, yang dihadiri Pejabat Sementara (Pjs) bupati Kabupaten Puncak, DPRD Kabupaten Puncak, DANDREM Biak, DANDIM 1705 Nabire, KAPOLRES Puncak Jaya serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak.

ACARA TUTUP KOLAM BAKAR BATU

Proses ini merupakan tahapan akhir dari penyelesaian konflik antara massa pendukung Simon Alom dan Elvis Tabuni, acara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2012 ini ditandai dengan adanya bakar batu wam Agrarin dan bakar tulang-tulang babi. Dengan demikian maka berakhir pula tahapan-tahapan penyelesaian konflik antara kedua massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Simon Alom-Yosia Tenbak dengan Elvis Tabuni- Heri

Dosinaen. Yang menjadi harapan semua warga masyarakat adalah dengan berakhirnya tahap-tahap ini dapat berakhir pula pertikaian antara massa tersebut, sakit itu pasti saja masih ada didalam hati, karena telah kehilangan orang-orang yang dicintai, tetapi membalaskan dendam tidak akan pernah ada solusi, selain saling memaafkan itu akan menjadi obat manjur yang dapat menyembuhkan luka dihati, satu kata yaitu membangun Kabupaten Puncak menjadi yang terdepan, demikianlah yang dikatakan tokoh adat yang terkenal dikabupaten Puncak Naftali Wakerkwa

TAHAP CUCI DARAH KEPALA – KEPALA PERANG

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012, acara ini merupakan acara ritual adat masyarakat Kabupaten Puncak, yang ditujukan untuk keselamatan masyarakat Kabupaten Puncak, yang terlibat dalam perang. Dalam acara ini dilakukan juga acara masak (Bakar Batu) babi 150 ekor, ritual ini dilakukan dengan cara memanah babi, kemudian darahnya dicurahkan diatas tanah, sebagai bentuk pembersihan diri dan kemudian di isi dengan acara doa bersama untuk keselamatan warga masyarakat Kabupaten Puncak.

ACARA ADAT BAKAR BATU KHUSUS LAKI-LAKI CUCI DARAH

Acara ini dilakukan pada tanggal 14 Juli 2012, dalam tahap ini dilakukan acara bakar batu babi sebanyak 100 ekor, namun bedanya dengan acara bakar batu pada umumnya, karena acara bakar batu khusus laki-laki cuci darah ini dikhususkan buat kaum laki-laki dan tua-tua adat, hal ini dilakukan sebaga bentuk dari doa bagi keselamatan kaum laki-laki. Acara bakar batu ini dilakukan di masing-masing suku/marga, dan dalam hal ini ada 18 suku/marga (lihat point 3).

ACARA ADAT BAKAR BATU KHUSUS KAUM PEREMPUAN

Pada tahap ini, akan dilaksanakan acara bakar batu babi sebanyak

100 ekor, secara khusus untuk kaum wanita saja, acara bakar batu ini dilakukan dimasing-masing suku/marga dalam hal ini ada 18 suku/marga (lihat point 3), acara bakar batu khusus kaum perempuan ini dilakukan pada tanggal 15 Juli tahun 2012, bakar batu ini bertujuan untuk mencuci darah dan merupakan doa keselamatan bagi seluruh kaum perempuan di Kabupaten Puncak.

ACARA ADAT BAKAR BATU BABI 600 EKOR

Tahap ini merupakan tahap yang paling besar, karena akan diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak, acara ini ditempatkan di distrik Gome. Acara ini dilaksanakan pada 26 juli 2012.

DAMPAK KONFLIK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LANGSUNG KEPALA DAERAH KABUPATEN PUNCAK TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PUNCAK PEMERINTAHAN

Menurut kepala bagian tata pemerintahan Kabupaten Puncak dan otonomi daerah Kabupaten Puncak, Bapak Jhon Kogoya., S.Sos. Selama terjadinya konflik dikabupaten Puncak, pemerintahan daerah tidak berjalan (lumpuh total), beliau mengatakan, konflik politik ini tidak hanya melibatkan politisi didaerah namun juga melibatkan unsur-unsur pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Puncak, hal ini terbukti dengan adanya beberapa PNS yang mendukung salah satu kandidat calon bupati yang bertikai, ada beberapa alasan dukungan ini, ada yang atas dasar keluarga dan ada pula yang atas dasar politik. Hal ini menyebabkan ada perpecahan pula dalam tubuh pegawai negeri sipil sendiri. Perpecahan ini berujung kepada pembangunan yang tidak berjalan, semua pegawai negeri sipil memilih untuk tinggal di daerah-daerah yang aman, ada yang di kabupaten Nabire, kabupaten Timika dan kabupaten Jayapura dan kota Jayapura. Sehingga, Kabupaten Puncak

pada saat itu mengalami kekosongan. Tidak ada yang mengatur pemerintahan di daerah karena semua pegawai negeri sipil terancam nyawanya.

Menurutnya (Jhon Kogoya., S.Sos) pemerintah yang seharusnya netral, tetapi untuk konflik di Kabupaten Puncak ini, tampak jelas-jelas keterlibatan PNS sangat nyata-nyata. Pemerintah daerah provinsi Papua dan Pemerintah Pusat seharusnya cepat tanggap dengan kondisi seperti ini, karena ini menyangkut kepentingan pembangunan di daerah Kabupaten Puncak, karena hal ini dikawatirkan dimasa-masa mendatang bila terjadi konflik serupa, maka otomatis pemerintahan di kabupaten Puncak akan lumpuh kembali.

EKONOMI

Menurut salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih, asal Kabupaten Puncak, saudara Kores Kogoya, konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Puncak ini, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Puncak. Hal ini tampak dari pasar-pasar yang ada di kabupaten Puncak ditutup akibat perang, sehingga masyarakat tidak bisa berdagang, kondisi ini diperparah dengan ladang dan kebun masyarakat dirusak oleh massa yang bentrok, perang yang melibatkan semua warga di kabupaten Puncak itu, tidak hanya menyerang manusia saja, tetapi hewan (babi dan ayam), tanaman kebun (ubi, keladi, tebu, pisang dan lain-lain) ikut dijarah, demikian halnya dengan rumah-rumah pun dijarah dan dibakar. Hal ini menyebabkan terjadi kelaparan yang hebat saat itu Kabupaten Puncak.

Menurutnya sarana pendukung perekonomian daerah seperti bandara dan jalan-jalan utama di kabupaten Puncak, tidak dapat difungsikan karena konflik tersebut, padahal masyarakat Kabupaten Puncak sering menggunakan fasilitas bandara sebagai transportasi untuk memasarkan hasil bumi mereka ke daerah-daerah sekitarnya

seperti kabupaten Timika, kabupaten Nabire dan kabupaten Jayapura.

PENDIDIKAN

Konflik politik yang terjadi di Kabupaten Puncak sangat berdampak terhadap dunia pendidikan di kabupaten Puncak, menurut penjelasan dari salah seorang kepala sekolah sekolah dasar di distrik Ilaga, bernama Marka Wakerkwa, S.Pd, konflik ini berakibat pada ditutupnya semua sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Puncak, karena banyak guru-guru dan para murid yang memilih untuk mengungsi ke daerah lain, hal yang lebih parah menurutnya (Marka Wakerkwa) ada guru-guru yang terlibat dalam konflik tersebut, demikian pula dengan siswa-siswa, entah itu siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ikut juga terlibat dalam konflik, maksudnya saat terjadi perang, mereka-mereka ini juga ikut berperang dengan menggunakan parang, busur dan anak panah.

INFRASTRUKTUR UMUM

Pada saat konflik terjadi banyak sekali infrastruktur umum yang tidak beroperasi, seperti yang diungkapkan oleh seorang warga masyarakat Kabupaten Puncak, yaitu Charlos Wakerkwa, ia mengatakan bahwa mulai dari rumah sakit daerah, bandara udara, pasar, rumah-rumah ibadah yang seharusnya menjadi bangunan yang sakral, namun pada saat itu turut dibongkar oleh massa yang sedang konflik banyak kantor-kantor pemerintahan pun di rusak dan ada pula yang dibakar oleh massa. Semua fasilitas umum di Kabupaten Puncak pada saat itu lumpuh total dan tidak ada aktifitas sama sekali. Fasilitas umum yang seharusnya dilindungi, karena semua masyarakat mempunyai kepentingan didalamnya, malah sebaliknya pada saat konflik fasilitas seperti malah dirusak, ia (Charlos) mengatakan bahwa, fasilitas umum itu dirusak karena dianggap dapat dijadikan

tempat persembunyian musuhnya.

Fasilitas umum yang paling sakral yaitu gereja pun tidak luput dari serangan massa, padahal menurutnya gereja merupakan tempat yang paling aman, hal ini disebabkan karena pada saat itu salah satu kandidat calon bupati di Kabupaten Puncak, yaitu Elvis Tabuni, menggunakan gereja sebagai pusat kegiatan partai yang mengungsungnya yaitu Partai Gerindra. Sehingga, ketika terjadi penyerangan pertama kali dilakukan oleh massa pendukung calon bupati Simon Alom - Yosia Tenbak adalah gereja, tempat dimana massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Elvis Tabuni dan Heri Dosinaen bermarkas. Hal ini menurutnya (Charlos Wakerkwa) adalah suatu pelanggaran besar, membuat Tuhan, mengutuk kedua calon bupati yang bertikai dan massa pendukungnya, sehingga perang yang awalnya tidak bisa memakan korban yang besar, namun karena rumah Tuhan (gereja) telah dihancurkan, sehingga perang pun sulit untuk diakhiri dan menimbulkan korban yang sangat banyak dari kedua belah pihak.

SOSIAL DAN BUDAYA

Konflik politik di Kabupaten Puncak ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat, menurut seorang tokoh adat dari suku dani, bernama Naftali Wakerkwa, mengatakan bahwa sistem kekerabatan yang sangat kuat yang telah dibangun sangat lama, baik itu dalam honai (rumah adat), rumah-rumah yang berbentuk bundar dan beratap ilalang tersebut merupakan ruang-ruang cultural tempat kelompok-kelompok masyarakat di Pucak bertemu dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan perikehidupannya. Boleh di bilang Honai merupakan ranah bagi masyarakat untuk membangun interaksi cultural mereka dan juga sering kali di gunakan sebagai instrument pemberdayaan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Demikian hal dengan Gereja yang selalu tempat untuk membangun ikatan kekeluargaan tiba-tiba

saja berubah, Konflik ini membuat semuanya berubah, menurutnya (Naftali Wakerkwa) warga masyarakat sudah tidak bisa duduk sama-sama lagi dalam satu Honai, demikian halnya dalam Gereja, semuanya bubar dan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, akibat dari dukungan politik yang berbeda-beda.

Menurutnya konflik politik ini sangat berpengaruh terhadap masa depan kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Puncak, karena akan adanya rasa curiga antara satu dengan yang lainnya, dan juga adanya rasa dendam yang turun temurun akibat terbunuhnya keluarga atau orang terdekat mereka. Hal ini menurutnya akan sangat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat di Kabupaten Puncak, karena akan terjadi saling membunuh yang terus menerus dan tidak pernah ada akhirnya.

KESIMPULAN

Papua tidak terlepas dari konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, penyebab utama konflik terjadi dipapua adalah masalah belum ada kesamaan paradigma seputar sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Terjadi dualisme rekomendasi partai, DPP dan DPD memberikan rekomendasi kepada Simon Alom dan Yosia Tenbak dan rekomendasi partai gerindra DPC diberikan kepada Elvis Tabuni dan Herri Dosinaen, untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dari partai Gerindra. Ketua DPC Thomas Tabuni memberikan rekomendasi ini atas permintaan Elvis Tabuni karena hubungan emosional antara ayah (Elvis Tabuni) dan anak (Thomas Tabuni). Pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Puncak menganggarkan dana 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) untuk membayar korban yang meninggal menerima 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per jiwa dan 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk korban luka-luka. Selain itu pula dilakukan pesta adat bakar batu dan makan bersama untuk perdamaian antara kedua massa pendukung.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Ari A. AGN Dwiparaya, 10 Agustus 2015, Pointer Kuliah Manajemen Konflik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ahmadi. (1999). Psikologi Sosial. Rineka Cipta. Jakarta.
- Anthony Giddens, 2004, Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Agus Hardjana, M, 1994, Konflik Ditempat Kerja, Yogyakarta, Kanisius
- A. A Gge Febri Purnama Putra. "Meretas Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung: Belajar dari Konflik Pilkada Langsung Kabupaten Gianjar dan Kabupaten Buleleng" Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL UGM, Yogyakarta, Gava Media.
- Budiman, Arif, 2002, Teori Negara Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta, PT. Gramedia.
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif, Surabaya:Airlangga University Press. 2001.
- Daeng Hans, J, 2000, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologi, Yogyakarta, P
- Dean G. Pruitt dan Rubin Jeffrey Z, 2004, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dahrendorf, Ralf, 1986, Konflik dan konflik dalam masyarakat industri, sebuah analisa-kritik, Ali Hamdan (pentj). Jakarta, CV. Rajawali.
- Elvi Juliansyah, S.Sos., Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung, Mandar Maju 2007.
- Hadari Nawawi, Metode penelitian Bidang Sosial Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Hadi, S. 2000. Metodologi research. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hugh Miall, Ramsbotham dan Woodhpuse Tom, 2000, Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelaraskan, mengelola, mencegah dan mengubah konflik bersumber politik Sosial agama dan ras,, Satrio Budi Tri (pentj.), Jakarta PT. Raja Grafindo
- Hotman Siahaan, 1996, Pembakangan Terselubung Petani dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai upaya mempertahankan Subsestansi Program.
- Haryanto, 1991, Elit Massa dan konflik PAU Studi Sosial, UGM, Yogyakarta.

JURNAL

- Gregorius Sahdan, Analisis CSIS Reformasi dan Paradoks Demokrasi, Volume 34, No 4 Desember 2005.
- Habbodin, Muhtar, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Journal of Government and Politics, Volume 3 Nomor 1, Februari 2012
- Mahrudin, Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton, Journal of Government and Politics, Volume 1 Nomor 1 Agustus 2010.